

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Unsur geografis yang dimiliki oleh suatu negara sangat mempengaruhi kehidupan penduduknya. Seperti Negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, memiliki banyak kesamaan geografis karena letaknya yang berdekatan. Oleh karena itu kondisi sosial, ekonomi, dan budayanya banyak memiliki kesamaan. Dimana unsur geografis yang dimaksud merupakan letak, luas, batas, iklim, bentang alam, dan sebagainya. Letak astronomis wilayah Asia Tenggara berada pada 28' LU- 11" LS dan 92' BT - 141'BT, dengan batas geografis berupa Samudra Hindia dan Teluk Banggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di bagian utara, dan Samudra Pasifik di bagian timur ("Hubungan Unsur Geografis dan Penduduk Asia Tenggara", dalam situs: <http://www.crayonpedia.org/mw/> diakses pada 11 Maret 2015).

Kawasan Asia Tenggara memiliki dua bagian utama bentangan alam yaitu: daratan berbentuk semenanjung dan daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah daratan berbentuk semenanjung atau tanjung yang besar di Asia Tenggara meliputi Negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Wilayah Malaysia bagian barat, sedangkan wilayah berbentuk gugusan kepulauan meliputi Negara Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, dan Singapura.

Letak geografis Indonesia berada pada daerah tropis yang terletak diantara dua benua dan dua samudra sehingga Indonesia memiliki cuaca dan iklim maritim yang khas. Jutaan masyarakat Indonesia bertempat tinggal di daerah pantai yang berdekatan dengan laut dan menjadikan laut sebagai sumber penghidupan. Dengan ini Indonesia merupakan negara kepulauan dimana sebagian besar wilayah pantai Indonesia rawan terlanda bencana.

Seperti yang kita ketahui bahwa wilayah kepulauan Indonesia berada di atas pertemuan tiga lempeng raksasa yaitu Lempeng Benua Eurasia, Lempeng Samudra Pasifik, dan Lempeng Samudra Indo-Australia, dimana lempeng-lempeng ini terus berinteraksi bahkan sejak beberapa juta tahun yang lalu. Dari interaksi antar lempeng ini atau dikenal dengan proses subduksi terdapat lempeng samudera yang memiliki masa jenis lebih besar menunjam masuk dibawah lempeng benua hal ini menjadikan Indonesia memiliki beribu-ribu pulau dengan ratusan gunung berapi. Lempeng yang ada memiliki permukaan yang kasar, berlembah, dan bergunung. Karena tekanan yang terjadi terus menerus lempeng dapat patah, ketika lempeng patah yang terjadi lempeng di samudra akan melenting ke atas memberikan energi yang menyebabkan bergetarnya permukaan bumi, atau sering disebut sebagai gempa bumi, dari lentingan lempeng di samudra ini akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan air laut yang menyebabkan terjadinya gelombang tsunami.

Pulau-pulau di wilayah Indonesia berhadapan langsung dengan zona subduksi aktif, maka tsunami yang melanda Indonesia sebagian besar adalah tsunami-tsunami

lokal. Dengan ini rentan waktu antar terjadinya gempa bumi dengan datangnya gelombang tsunami ke daratan relatif singkat, umumnya sekitar tiga puluh menit.

Di Indonesia gempa bumi terjadi rata-rata 15 kali dalam sehari, seringnya gempa bumi ini dapat memicu terjadinya tsunami, sejak tahun 1600 hingga 2006 telah terjadi 109 tsunami di Indonesia. Sedangkan dalam satu tahun tsunami terjadi rata-rata dua kali, namun terulangnya tsunami di tempat yang sama berlangsung dalam waktu yang panjang. Sebelum terjadi tsunami di Aceh pada 26 Desember 2004, wilayah Aceh pernah dilanda tsunami pada tahun 1797, 1861, dan 1907. Tsunami terakhir yang melanda wilayah Aceh terjadi 100 tahun yang lalu tepatnya pada 1907 (UNESCO, 2008).

Indonesia adalah sebuah negeri yang rawan bencana, pernah terjadi dua letusan gunung api terbesar di dunia yaitu Gunung Tambora yang berada di Pulau Sumbawa tahun 1815 dan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Selain bencana-bencana bersekala besar yang pernah ada, Indonesia juga tidak lepas dari bencana yang terjadi hampir setiap tahun, yang menimbulkan kerugian tidak sedikit, seperti banjir yang hampir setiap tahunnya menimpa Jakarta dan wilayah di sekitarnya. Pemerintah Indonesia juga terus berusaha dalam mengurangi risiko bencana, termasuk bencana tsunami yang sering terjadi dengan skala dan dampak yang beragam, mulai dari yang tidak menimbulkan korban jiwa hingga yang merusak seperti gempa bumi dan tsunami Aceh tahun 2004.

Bencana yang paling mematikan awal abad ke-XXI terjadi di Indonesia, pada tanggal 26 Desember 2004, sehari setelah perayaan Natal dan sesaat sebelum jam 8 pagi waktu setempat, gempa bumi besar terjadi di dalam laut sebelah Barat Pulau Sumatera di dekat Pulau Simeuleu dengan skala 9,0 SR, dimana gempa bumi ini memicu terjadinya tsunami dengan kecepatan sampai 1000 kilometer perjam yang melanda sebelas negara di daerah Samudra Hindia, yaitu Sri Lanka, India, Maladewa, Thailand, Myanmar, Malaysia, Somalia, Tanzania, Seychells, Bangladesh, dan Kenya. Menewaskan lebih dari 225.000 jiwa di sebelas negara dan menimbulkan kehancuran hebat di kawasan pesisir negara-negara yang tertimpa bencana. Sepanjang abad XX hanya sedikit bencana yang menimbulkan korban jiwa semasif ini (BNPB, 2010).

Yang terjadi di Indonesia sendiri gempa bumi dan tsunami melanda kota Banda Aceh, di provinsi terbesar ujung Sumatra bagian Utara yang berjarak sekitar 300 kilometer dari pusat gempa utama. Mengakibatkan sekitar lebih dari 160.000 korban jiwa dan nilai kerusakan yang di timbulkan mencapai lebih dari Rp. 48 triliu. Dari keseluruhan korban jiwa, Indonesia merupakan negara dengan jumlah korban terbanyak, tercatat sebanyak 130.736 orang korban meninggal dan 37 orang hilang. Di susul dengan Srilangka diurutan kedua sebanyak 35.322 orang korban meninggal (*Australia's response to the Indian Ocean Tsunami*, 2006).

Ketika tsunami melanda pinggirannya Sumatera bagian Utara dan terus menuju Thailand, Asia Selatan, hingga ke daratan Afrika ribuan orang menjadi korban dan

terbawa arus air laut. Bahkan hingga lima tahun kemudian belum di ketahui jumlah tetap korban jiwa yang jelas dari kerusakan akibat bencana tersebut, lebih dari satu juta orang kehilangan tempat tinggal dan lebih dari US\$ 10 miliar kerusakan yang menimpa infrastruktur, perumahan dan bangunan lainnya. Bencana ini menimbulkan respon yang belum pernah terjadi sebelumnya, dimana masyarakat lokal dengan menggunakan cara apapun membantu mobilitas bantuan, yang diikuti dengan reaksi nasional lalu masyarakat internasional.

Setelah gempa dan tsunami Aceh, serbuan bantuan kemanusiaan dari dalam dan luar negeri serta media internasional memasuki wilayah Aceh. Wilayah yang saat itu masih dilanda konflik kekerasan dan sangat tertutup dari pemberitahuan media internasional. Namun, pasca bencana dahsyat Aceh telah menjadi perhatian dunia. Tidak hanya bantuan kemanusiaan yang hadir di tengah masyarakat Aceh tetapi mereka yang berkepentingan untuk melakukan penelitian ilmiah terhadap bencana besar juga turut hadir. Bencana besar yang melanda Aceh telah menjadi *wake up call* bagi masyarakat di Indonesia maupun dunia.

Saat ini dunia tidak lagi disibukan dengan hal-hal yang berbau perang, meskipun perang masih terjadi di beberapa tempat. Perubahan cara pandang lama yang telah mengakar bahwa bencana adalah sesuatu yang tidak dapat di prediksikna sebelumnya, tak terhindarkan, dan harus ditangani oleh para ahli tanggap dadurat, sedikit banyak mencerminkan bahwa peningkatan pemahaman akan bencana sebagai suatu masalah bersama masih harus ditingkatkan. Peningkatan pemahaman ini berjalan seiring

dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya penanggulangan kemiskinan, telah lama diakui umum bahwa salah satu dimensi kemiskinan yang mendasar adalah keterpaparan masyarakat terhadap risiko dan kemungkinan hilangnya pendapatan, termasuk yang diakibatkan oleh bahaya bencana alam. Pemahaman akan hal ini telah mendorong adanya perhatian yang lebih besar pada analisis bentuk-bentuk, penyebab mendasar, serta upaya penanganan bencana alam yang dapat memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bahaya bencana alam.

Besarnya perhatian pada upaya penanggulangan bencana dipengaruhi oleh meningkatnya kerugian yang ditimbulkan oleh bencana, terutama yang diakibatkan oleh meningkatnya kerentanan kerusakan aset ekonomi dan sosial serta kesejahteraan dan penghidupan masyarakat terhadap bencana alam. Antara tahun 1950-1990-an, kerugian nyata yang diakibatkan oleh bencana secara global dilaporkan telah meningkat 15 kali lipat, sementara jumlah orang yang terkena dampak bencana naik drastis dari 1,6 milyar dalam kurun waktu antara tahun 1984-1993 menjadi 2,6 milyar orang dalam periode tahun berikutnya (World Bank, 2006). Selama beberapa tahun-tahun belakangan ini bencana-bencana besar terjadi susul-menyusul dan menimbulkan korban jiwa serta kerugian ekonomi yang amat besar termasuk didalamnya bencana tsunami Samudera Hindia pada tahun 2004.

Meningkatnya kesadaran masyarakat dunia akan perlunya penguatan kerjasama pengurangan risiko bencana ke dalam penanggulangan bencana alam seperti yang formasikan pada bulan Januari tahun 2005 ketika Kerangka Aski Hyogo 2005-2015

diadopsikan oleh Konferensi Dunia untuk Pengurangan Bencana, dengan ditandatangani oleh 168 negara dan badan-badan multilateral. Kerangka Aksi Hyogo menitik beratkan pada tiga sarana strategis utama, yaitu:

Pertama, integrasi secara lebih efektif pertimbangan risiko bencana ke dalam kebijakan, perencanaan, dan program pembangunan berkelanjutan di semua tingkat, dengan penekanan khusus pada pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta peredaman kerentanan terhadap bencana,

Kedua, pembangunan dan penguatan lembaga, mekanisme dan kapasitas di semua tingkat, terutama pada tingkat komunitas sehingga dapat secara sistematis menyumbang pada peningkatan ketahanan (*resilience*) terhadap bahaya,

Ketiga, secara sistematis memadukan pendekatan-pendekatan peredaman risiko bencana kedalam rencana dan pelaksanaan program-program kesiapsiagaan terhadap keadaan darurat, tanggap darurat, dan pemulihan dalam rangka rekonstruksi komunitas yang terkena dampak (UN-ISDR, 2005).

Bencana kini menjadi ancaman yang serius bagi masyarakat dunia dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hal ini menjelaskan bahwa penting adanya kerjasama untuk membangun antisipatif guna memperkecil kemungkinan korban jiwa dan kerugian materi yang mungkin akan diakibatkan oleh suatu bencana. Masalah bencana alam merupakan suatu tantangan global yang mendapat perhatian khusus dari para Pemimpin ASEAN. Salah satu isu keamanan non tradisional yang menjadi topik pembicaraan penting di ASEAN adalah isu mengenai bencana alam.

Isu bencana alam ini telah menjadi fokus isu yang dibicarakan baik dalam Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi, tingkat menteri, sampai KTT ASEAN. Isu ini terkait dengan upaya penanganan dari kesiapsiagaan, tanggap darurat, sampai pemulihan bencana yang akan difokuskan salah satunya melalui kerjasama penanggulangan bencana alam. Dengan adanya fenomena bencana alam ini, para pemimpin ASEAN sepakat untuk lebih mengintensifkan kerjasama dalam meangulangi berbagai permasalahan di bidang bencana, baik yang terjadi di tingkat nasional, regional, maupun global.

ASEAN di bawah kepemimpinan Indonesia ingin memberikah hasil-hasil yang nyata dari setiap pertemuan. Prioritas dan fokus Indonesia selama menjadi ketua ASEAN tahun 2011 berupa: pertama, memastikan bahwa pada tahun 2011 mengalami kemajuan yang berarti dalam pencapaian Komutitas ASEAN 2015, kedua, memastikan terpeliharanya tatanan dan situasi yang aman di kawasan, untuk tercapainya pembangunan seperti KTT Asia Timur, dan ketiga, menyiapkan pandangan selanjutnya mengenai 'ASEAN setelah 2015'.

Dalam pertemuan ASEAN dengan mitra-mitra dialog dan konsultasi KTT Asia Timur yang di laksanakan di Nusa Dua, Bali pada bulan Juli tahun 2011 Indonesia berkeinginan agar hasil pertemuan dapat memenuhi harapan para anggota ASEAN, dimana hasil-hasil yang kongkrit akan memberikan ruang bagi penyelesaian berbagai agenda dan tantangan di kawasan. Dalam konteks KTT Asia Timur, Indonesia telah mengajukan prinsip-prinsip dasar yang mengatur atau menjadi pedoman para peserta pertemuan. Usulan Indonesia dalam pertemuan tersebut mendapat dukungan, bahkan

negara-negara peserta memberikan masukan untuk menyempurnakan prinsip-prinsip yang diusulkan.

Pada kesempatan ini, Indonesia memberi usulan mengenai kerjasama pengelolaan bencana di kawasan disambut baik, usulan tersebut berupa penguatan kerjasama saling tukar informasi dan mempercepat bantuan bencana alam. Negara-negara yang memiliki kesamaan pandangan memberikan kesempatan kerjasama yang besar di bidang ini. Selain itu bersama dengan ASEAN dan yang lainnya, Indonesia terlibat dalam *ASEAN Regional Programme on Disaster Management* (ARPD), suatu program kerja yang berperan aktif dalam menciptakan kawasan yang tangguh dalam menghadapi bencana.

Kontribusi Indonesia pada komunitas internasional bukan hanya dilihat sebagai penerima manfaat dari komunitas internasional pada saat bencana. Disisi lain, solidaritas sebagai bagian dari nilai kemanusiaan antar bangsa menjadi motivasi Indonesia untuk terlibat secara aktif dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di negara lain. Tidak hanya pada aksi kemanusiaan maupun pengiriman logistik, tetapi Indonesia juga berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai bencana, Indonesia memberikan pengetahuan kepada negara-negara lain yang ingin belajar mengenai penanggulangan bencana di Indonesia. Dalam pengurangan risiko bencana, Indonesia juga menyuarakan pentingnya pengurangan risiko bencana kepada negara-negara lain dengan cara ikut berperan aktif di tingkat regional dan internasional dalam mempromosikan

pentingnya pengurangan risiko bencana.

Dimana bencana dapat mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat baik berupa korban jiwa manusia, kerugian harta benda, maupun kerusakan lingkungan serta hancurnya hasil pembangunan yang telah dicapai antara lain kerusakan sarana dan prasarana serta fasilitas umum, penderitaan yang terjadi di masyarakat, dan sebagainya. Sehingga di kemudian hari akan disadari oleh negara-negara bahwa penting adanya kerjasama dalam bidang kemanusiaan, baik untuk mengatasi kerusakan yang ada setelah bencana maupun untuk mengadakan upaya pencegahan yang bertujuan untuk mengurangi resiko dari bencana alam lainnya yang kemungkinan akan terjadi. Dalam kejadian bencana sudah sewajarnya terjadi pemberian bantuan dan terjalannya kerjasama baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun negara.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas muncul rumusan masalah sebagai berikut, “Bagaimana upaya Indonesia dalam penguatan kerjasama penanggulangan bencana alam di ASEAN pasca bencana Gempa Bumi dan Tsunami Aceh tahun 2004?”.

C. Kerangka Dasar Pemikiran

Kerangka dasar pemikiran ini bertujuan untuk membantu penulis dalam menentukan tujuan dan arah penulisan serta pemilihan konsep dalam menyusun hipotesa untuk menjawab dan menjelaskan permasalahan di atas, penulis menggunakan

kerangka pemikiran sebagai berikut:

Konsep Diplomasi Bencana (Disaster Diplomacy)

S. L Roy dalam bukunya yang berjudul *Diplomacy* menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mendorong munculnya diplomasi baru. Faktor pertama adalah kebangkitan Negara Sosialis Rusia. Sebuah bentuk pemerintahan yang memandang baru segala bentuk tehnik diplomasi yang kemudian memasuki arena internasional dan mempengaruhi diplomasi baru. Rezim sosialis Rusia mempublikasikan dokumen rahasia rezim sebelumnya, dimana pada rezim tersebut disebutkan bagaimana negara-negara besar banyak melakukan perjanjian rahasia yang bertanggung jawab pada pecahnya Perang Dunai I. Kemarahan rakyat atas perlakuan rezim sebelumnya menutup kemungkinan terjadinya kerahasiaan perundingan yang mungkin dilakukan pada masa mendatang.

Faktor yang kedua adalah munculnya dunia baru, yakni Amerika Serikat sebagai kekuatan politik dunia baru serta keikutsertaan negara-negara Amerika Latin dalam dunia internasional.

Faktor yang ketiga adalah kebangkitan Asia secara bertahap dalam dunia internasional. Cina memiliki kepentingan yang cukup besar dalam hubungan internasional.

Faktor keempat adalah kebangkitan pendapat umum pada pertengahan akhir abad ke-19 dimana pendapat umum memiliki kekuatan yang cukup besar dalam diplomasi. Suatu negara tidak dapat mengabaikan begitu saja pendapat umum

dalam merumuskan kebijakan politik luar negeri.

Faktor kelima adalah perkembangan sistem komunikasi, saat ini seorang duta besar bisa melakukan kontak langsung dengan pemerintahnya selama perundingan berlangsung. Transformasi pada masyarakat internasional juga memberi pengaruh pada perkembangan diplomasi (S.L Roy, 1995).

Diplomasi saat ini memiliki tantangan baru, baik pada perluasan agenda kebijakan luar negeri, perubahan tuntutan sosial, maupun pertumbuhan yang cepat dari agenda domestik seperti organisasi non pemerintah. Salah satu kekuatan diplomasi saat ini adalah penggunaan teknologi informasi yang canggih dalam komunikasi. Terlebih di abad ke 21 ini agenda internasional mensyaratkan keahlian diberbagai bidang energi, lingkungan, keuangan, ekonomi, hak asasi manusia, kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi serta kebencanaan. Hingga diplomasi pada abad ini dikarakteristikan dengan koordinasi dan kerjasama antar institusi dalam mencari solusi atas sebuah permasalahan. Institusi yang saling bekerja sama tidak hanya institusi resmi milik pemerintah, melainkan juga organisasi internasional dan non-pemerintah.

Dengan meluasnya isu-isu yang dibahas, hal ini menyebabkan bermunculan istilah baru dalam diplomasi, istilah-istilah yang muncul mengacu pada isu yang dijadikan sebagai metode diplomasi seperti *Disaster Diplomacy*, *Humanitarian diplomacy*, *Public diplomacy*, dan sebagainya.

Nenurut Louise K. Comfort, isu bencana sekarang ini menjadi salah satu isu yang krusial bagi peningkatan kualitas kesejahteraan manusia. Bencana tidak harus di definisikan sebagai bencana alam semata, namun bencana alam disini dapat diartikan pula sebagai bencana penyakit menular yang memiliki efek global seperti virus endemik flu burung, flu babi, ataupun isu pemanasan global. Pendefinisian bencana sebagai isu global diharapkan dapat meningkatkan empati dari masyarakat dunia untuk terlibat bersama dalam penyelesaian permasalahan bencana.

Studi diplomasi bencana memakai bencana sebagai sebuah instrumen yang penting untuk memperjuangkan kepentingan politik seperti perdamaian, kepentingan ekonomi, atau kepentingan sosial budaya untuk membangun komunitas humanis dan berkeadaban (“Diplomasi Bencana Alam: Keniscayaan”, dalam situs <http://surwandono.staff.umy.ac.id/> diakses pada 11 Maret 2015). Bila pada umumnya fenomena bencana alam hanya dianggap sebagai suatu musibah yang merugikan, namun prespektif positif melihat sisi lain dari bencana alam dimana bencana alam dapat memberikan nilai tambah yang sangat besar untuk menyelesaikan masalah yang ada di suatu negara.

Dengan ini menandakan bahwa masyarakat internasional telah memiliki kesadaran yang tinggi mengenai bencana alam yang belakangan ini sering terjadi, dimana bencana dapat dilihat melalui sisi baiknya salah satunya berupa pihak-pihak yang bersengketa dapat saling menurunkan ketentingannya

masing-masing untuk bekerjasama mengurangi bencana untuk perlindungan manusia (*human security*).

Diplomasi bencana (*Disaster Diplomacy*) merupakan suatu kegiatan diplomasi yang diterapkan pada saat bencana terjadi di suatu negara. Menurut Ilan Kelman dalam tulisannya tentang *Tsunami Diplomacy* menjelaskan bahwa pada kenyataannya hubungan yang didasarkan pada bencana atau penanggulangan bencana sifatnya tidak bertahan lama, namun hal ini dapat mengesampingkan konflik-konflik yang pernah ada dan mengaburkan hubungan yang tidak baik antara pihak-pihak yang berkonflik. Selain itu, diplomasi bencana dapat menciptakan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa dalam kondisi penanggulangan bencana ("*Tsunami Diplomacy: will the 26 December 2004, Tsunami Bring Peace to the Affected Countries? Sociological Research Online.vol. 10, issue.1*", dalam situs <http://www.socresonline.org.uk/> diakses pada 11 Maret 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh I. Kelman, menyatakan bahwa bencana tidak hanya memberikan dampak yang buruk pada masyarakat, namun pada keadaan tertentu bencana yang terjadi dapat dijadikan kunci penyelesaian masalah-masalah politik dan konflik di suatu negara. Pemikiran utama yang dinyatakan oleh Kelman, bahwa bencana dapat memberikan kesempatan yang besar bagi pihak-pihak yang berada di daerah potensi rawan bencana untuk mencari ruang dalam menangani maupun mengurangi bencana alam itu sendiri

maupun yang lainnya.

Studi Kelman lainnya mengenai konflik Aceh memberikan gambaran tentang konflik yang terjadi antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia yang telah berlangsung selama dua puluh lima tahun dan belum menemukan jalan keluar dalam penyelesaian masalah. Kedua belah pihak telah melakukan perundingan perdamaian sejak tahun 1995 yang telah melibatkan banyak pihak.

Kelman dalam penelitiannya semakin menunjukkan fungsi diplomasi bencana alam. Dalam penelitian tersebut Kelman membuktikan bahwa bencana alam berhasil memberikan kesempatan bagi negara-negara untuk meningkatkan kerjasama politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Negara-negara yang diklasifikasikan sebagai daerah rawan bencana atau berpotensi terkena dampak bencana, negara yang tidak melakukan kerjasama intensif, bahkan negara-negara yang saling bermusuhan kemudian memilih bekerjasama untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Seperti yang dilakukan antara Indonesia, Cina, dan Jepang, negara-negara ini memilih untuk meningkatkan kualitas hubungan kerjasama selain karena hubungan politik-ekonomi, hal ini juga terkait dengan potensi Indonesia, Cina, dan Jepang sebagai wilayah yang rawan bencana seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi.

Ada beberapa kerjasama yang terjalin berhubungan dengan bencana, baik pra-bencana seperti mitigasi dan pencegahan serta pasca bencana seperti *respon*

and recovery, yang membawa pengaruh positif terhadap negara yang belum pernah bekerjasama bahkan rawan konflik, diplomasi bencana juga dapat dilihat sebagai bentuk prevensi mitigasi dan mampu mengurangi kerugian serta menjalin hubungan dengan negara-negara lain dengan baik bahkan sebelum bencana itu terjadi. Dan yang terjadi setelahnya adalah adanya respon berupa perbaikan dan rekonstruksi.

Diplomasi bencana melihat kemungkinan perdamaian dan konflik yang terjadi karena adanya bencana. Hal penting lainnya dari diplomasi bencana adalah diplomasi bukan mengenai cara untuk meperoleh pemasukan entah itu untuk pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Diplomasi ini mengenai bagaimana cara agar kita mampu mengubah situasi (*Arthur clarke, An Interview with Ilan Kelman: Article*).

Diploamasi bencana berperan tidak hanya dalam urusan internal maupun hubungan internasional, tetapi juga bisa memasuki segala bentuk konflik. Artinya “diplomasi” dapat didefinisikan secara luas. Diplomasi bencana juga mendefinisikan bencana secara luas, yang dilihat bencana bukah hanya sekedar fenomena yang berkaitan dengan alam, seperti banjir dan gempa bumi, tetapi juga terkait dengan kasus seperti ledakan industri, kekeringan dan perubahan iklim global.

Pemikiran I. Kelman ini didukung dengan pernyataan dari *American Society of Civil Engineers* (ASCE) yang mengatakan bahwa suatu negara akan

mendapatkan banyak pelajaran setelah terjadinya bencana. Pelajaran itu bisa berupa pelajaran dalam membuat suatu keputusan, integrasi struktural, bagaimana merespon bencana dan komunikasi (*ASCE External Review Team*).

Dari bencana ini dapat dikatakan bahwa akan dilihat hal-hal yang nantinya akan membuat kita memahami dan akhirnya mengubah kondisi dari suatu negara, entah itu membawa negara menjadi lebih baik karena mampu menangani bencana dengan tepat atau malah memperburuk kondisi negara.

Studi kontemporer yang dilakukan oleh I. Kelman menunjukkan bahwa bencana tidak selalu menjadi faktor yang buruk bagi masyarakat, namun dalam batas tertentu dapat dikelola untuk menyelesaikan persoalan-persoalan politik dan konflik yang selama ini belum dapat terpecahkan, baik konflik nasional maupun antar negara. Argumen besar dari Kelman adalah bencana justru memberikan ruang yang besar bagi pihak-pihak yang memiliki potensi sebagai daerah rawan bencana untuk mencari ruang yang bisa dikerjakan agar dapat mengurangi resiko yang mungkin dapat ditimbulkan dari bencana alam itu sendiri (“Artikel Jurnal *The First Postgraduate Research Conference Improving Human Live: ‘Indonesia’s Diplomacy In Disaster Issue: How To Capitalize As Soft Diplomacy’*”, UMY, 2013).

Bentuk diplomasi ini, meletakkan negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak lain sebagai pihak yang mampu melihat bencana bukan hanya sebagai bagian buruk, namun dapat memaknai bencana sebagai sebuah instrumen

penguatan kerjasama penanggulangan bencana dengan beberapa pihak baik itu lokal maupun internasional. Dalam penerapannya diplomasi bencana dapat di kategorikan sebagai diplomasi lunak (*soft powers diplomacy*) yaitu diplomasi yang dijalankan atas dasar kesepahaman, baik negara subjek atau negara objek untuk mencapai sebuah tujuan yang menguntungkan.

D. Hipotesa

Upaya Indonesia dalam membangun penguatan kerjasama penanggulangan bencana alam di ASEAN, berupa:

Pertama, Indonesia bergabung serta berperan aktif dalam institusi-institusi internasional mengenai kebencanaan agar tercipta masyarakat yang tagguh dan tanggap dalam menghadapi bencana alam.

Kedua, Indonesia juga menjadikan bencana sebagai sebuah instrumen penguatan kerjasama bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan karyatulis ini terbagi dalam lima bab, berikut adalah rincian pembahasan yang terdapat dalam setiap bab;

Bab I: berisi pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, sistematika penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, dan jangkauan penelitian.

Bab II: berisi gambaran umum pergeseran pola penanggulangan bencana di Indonesia

Bab III: berisi tentang respon komunitas internasional terhadap penanggulangan bencana oleh Indonesia.

Bab IV: berisi tentang penanggulangan bencana alam dan transformasi kerjasamas ASEAN.

Bab V: berisi kesimpulan dari hasil pembahasan di bab-ba sebelumnya.

F. Tujuan Penelitian

- i. Secara umum penulisan karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan berupa konsep diplomasi bencana yang dapat dijadikan sebuah instrumen yang penting untuk memperjuangkan kepentingan politik seperti perdamaian, kepentingan ekonomi, atau kepentingan sosial budaya untuk membangun komunitas humanis dan berkeadaban.
- ii. Penulisan karya tulis ilmiah ini juga bertujuan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu sosial dan Politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, dimana didalam penelitian akan menggambarkan permasalahan yang diteliti sesuai dengan validitas

data yang memberikan informasi dari penelitian ini. Dengan metode pengumpulan data berupa telaah pustaka (*library reserch*) yaitu pengumpulan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas kemudian menganalisisnya. Literatur yang dimaksud berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, surat kabar, dan situs-situs internet ataupun laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

H. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dalam penelitian ini berfungsi sebagai pembatas bahasan pada topik yang akan diangkat. Dengan demikian pembahasan tidak mengalami perluasan yang dapat menyebabkan penelitian yang kurang fokus, rancu, dan kurang ilmiah.

Pada penelitian kali ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian berupa apa saja yang dilakukan oleh Indonesia dalam membangun kesadaran penanganan bencana di ASEAN pasca terjadinya gempa bumi dan tsunami Aceh pada tahun 2004 hingga sekarang.